

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri yaitu Polri tidak perlu lagi untuk menyusun rancangan strategi kebijakan keamanan negara. Dampak negatif Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri yaitu bahwa terdapatnya bentuk keberpihakan dalam penegakan hukum dibawah naungan Kementerian yang mengganggu independensi Polri.
2. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara bila dikaitkan dalam tiga pemisahan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada kewenangan penegakan hukumnya Polri akan berada pada kekuasaan eksekutif yang semestinya harus pada kekuasaan yudikatif.

B. Saran

1. Seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah pengawasan yudikatif dalam hal penegakan hukum, agar tidak terjadinya keberpihakan bila dibawah Kementerian.

2. Agar Negara Republik Indonesia konsisten dalam menjaga independensi setiap lembaga-lembaga negara yang jauh dari kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta
- Budi Gunawan, 2005. *Membentang Paradigma Baru*, Exatama Group, Jakarta
- Ellydar Chaidir, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta
- H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan RI, Makalah: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Denpasar
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta
- M.Gaussyah, 2014, *Peran dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri and Good Govenance*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang.
- Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta
- Suyono, 2007, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta.
- Tanumidjaja, Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.

W.J.S.Poerwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yeyen Maryani, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta Timur

Yoyok Ucok Suyono, 2014, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksabang Grafika, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Tap.MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tap.MPR RI Nomor: VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI.

C. Sumber Lainnya

Aulia Nur Wihdatil Aini, dkk, 2019, Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002, *Jurnal Sejarah Universitas Negeri Semarang*, diakses pada tanggal 18 januari 2023 pukul 23.39 WIB, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>

Deni Purbowati, 2020, *Teknik Analisa Data Apa, Bagaimana, Dan Ragam Jenisnya*, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data->

[apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya](#). diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 20.05 WIB

Devi Setya, 2022, Sejarah Polri, Ternyata Berawal dari Zaman Kerajaan Majapahit, detikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6156745/sejarah-polri-ternyata-berawal-dari-zaman-kerajaan-majapahit>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.55 WIB

lib.unnes.ac.id/330/1/1055.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 02.41 WIB

Jean Daryn Hendar Iskandar, Jurnal: “*Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 22.45 WIB

Krisnaptik, “*Kedudukan Polisi dan System Kepolisian di Era Demokrasi*”, <https://krisnaptik.com/blog/kedudukan-polri-dan-system-kepolisian-di-era-demokrasi>. Diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 21.04 WIB

Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 04.06 WIB

repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6757/Skripsi%20Andri.pdf?sequence=1 diakses tanggal 8 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB